

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS DAN BELANJA MODAL PADA KOTA
DAN KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



Nama : Deri Amzar
NIM : 222015150

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

SKRIPSI

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS DAN BELANJA MODAL PADA KOTA DAN
KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : Deri Amzar

NIM : 222015150

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan
Nama : Deri Amzar
NIM : 222015150
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Agustus 2020

Pembimbing I



Rosalina Ghazali, Hj. SE, Ak, M.Si
NIDN/NBM: 0228115802/1021961

Pembimbing II



Welly, SE, M.Si
NIDN/NBM: 0212128102/1085022

Mengetahui,
Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi



Welly Sirajuddin, SE, Ak, M.Si, CA
NIDN/NBM: 0216106902/994806

PERNYATAAN BEBAS PLAIGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Deri Amzar
NIM : 222015150
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Pada Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Satri Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah dituli atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakberesan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Palembang, Agustus 2020



Deri Amzar

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- *“Tentukan jalanmu dengan pasti, karena pilihan hanya ada dua jalan, yaitu jalan keselamatan atau kehancuran”.*

(Deri Amzar)

Dengan ridho ALLAH SWT

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- *Ayahku dan Ibuku*
- *Pembimbing Skripsiku*
- *Almamaterku*

PRAKATA



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan**” tepat pada waktunya, dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2017-2019 dominan bersifat fluktuatif, dimana rata-rata Pendapatan Asli Daerah tertinggi pada Kota Palembang dan terendah pada Kabupaten Muratara. Dana Alokasi Umum (DAU) dominan meningkat, dimana rata-rata tertinggi pada Kota Palembang dan terendah pada Kabupaten OKI Timur. Dana Alokasi Khusus (DAK) dominan fluktuatif, dimana rata-rata tertinggi pada Kota Palembang dan terendah pada Kota Prabumulih. Sedangkan Belanja Modal dominan fluktuatif, dimana rata-rata Belanja Modal tertinggi pada Kota Palembang dan terendah pada Kota Prabumulih. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosalina Ghazali, Hj, SE.Ak, M.Si., dan Ibu Welly, SE.,M.Si., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingannya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak DR. M. Abid Djazuli, SE.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Para Dosen Pengasuh dan Karyawan serta seluruh Civitas Akademika yang telah mendidik kami selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA., selaku ketua Program Studi Akuntansi dan ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si., selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
6. Almamaterku.

Semoga Allah SWT, berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan ini sangat penulis harapkan.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatu.

Palembang, Agustus 2020
Penulis,

Deri Amzar

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori	12
1. Pendapat Asli Daerah	12
2. Dana Alokasi Umum	19
3. Dana Alokasi Khusus	26
4. Belanja Modal	31
B. Penelitian Sebelumnya	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Operasionalisasi Variabel	40
D. Data yang Diperlukan	41

E.	Populasi dan Sampel.....	42
F.	Metode Pengumpulan Data.....	43
G.	Analisis Data dan Teknik Analisis Data	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A.	Hasil Penelitian.....	47
1.	Gambaran Umum	47
2.	Data Penelitian	48
B.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	52
1.	Pendapatan Asli Daerah.....	52
2.	Dana Alokasi Umum.....	59
4.	Dana Alokasi Khusus	63
4.	Belanja Modal	67
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	73
A.	Simpulan	73
B.	Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	75
	LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal pada Kota Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan	7
Tabel II. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	38
Tabel III. 1 Operasionalisasi Variabel.....	40
Tabel III. 2 Sampel Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan.....	43
Tabel IV. 1 Luas Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan 2020.....	48
Tabel IV. 2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2019	49
Tabel IV. 3 Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2019	50
Tabel IV. 4 Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2019	51
Tabel IV. 5 Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2019.....	52
Tabel IV. 6 Persentase Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2019	53
Tabel IV. 7 Persentase Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2019.....	59
Tabel IV. 8 Persentase Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2019.....	64
Tabel IV. 9 Persentase Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2019	67
Tabel IV. 10 Persentase Belanja Modal yang Fluktuatif pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2019	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Diaram Alir Pengalokasian Dana Alokasi Khusus.....	31
Gambar IV. 1 Persentase Pendapatan Asli Daerah yang Fluktuatif pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	54
Gambar IV. 2 Persentase Peningkatan Dana Alokasi Umum pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.....	60
Gambar IV. 3 Persentase Dana Alokasi Khusus yang Fluktuatif pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	65
Gambar IV. 4 Persentase Belanja Modal yang Fluktuatif pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Selesai Riset dari Tempat Penelitian	78
Lampiran 2 Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan	79
Lampiran 3 Sertifikat AIK	79
Lampiran 4 Sertifikat Toefl.....	80
Lampiran 5 certificate of completion.....	82
Lampiran 6 Plagiarism Chacker X of Report.....	83
Lampiran 7 Berita Acara Komprehensif.....	84
Lampiran 8 Lembar Persetujuan Skripsi.....	85
Lampiran 9 Biodata Penulis	87

ABSTRAK

Deri Amzar/222015150/2020/ Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal pada kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 8 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat empat variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Sampel dalam penelitian ini berjumlah berjumlah 17 Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2017-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik analisis data menggunakan persentase. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2017-2019 dominan bersifat fluktuatif, dimana rata-rata Pendapatan Asli Daerah tertinggi pada Kota Palembang dan terendah pada Kabupaten Muratara. Dana Alokasi Umum (DAU) dominan meningkat, dimana rata-rata tertinggi pada Kota Palembang dan terendah pada Kabupaten OKI Timur. Dana Alokasi Khusus (DAK) dominan fluktuatif, dimana rata-rata tertinggi pada Kota Palembang dan terendah pada Kota Prabumulih. Sedangkan Belanja Modal dominan fluktuatif, dimana rata-rata Belanja Modal tertinggi pada Kota Palembang dan terendah pada Kota Prabumulih.

Kata Kunci: PAD, DAU, DAK, belanja modal

ABSTRACT

Deri Amzar / 222015150 / 2020 / An Analysis of Original Local Government Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Capital Expenditure on Cities and Regencies in South Sumatera Province

This research aimed to analyse original local government revenue, general allocation fund, special allocation fund and capital expenditure on cities and regencies in South Sumatera province. This research included descriptive research. Research conducted on Regional Revenue of Financial and Asset (BPKAD) of South Sumatera province which was located at Jalan Merdeka No. 8 of Talang Semut regency, Bukit Kecil subdistrict, Palembang City South Sumatera province. There were four variables: original local government revenue, general allocation fund, and special allocation fund on capital expenditure. The samples in this study numbered 17 cities/counties in the province of South Sumatera in the period 2017-2019. The data in this study was secondary data. The data analysis technique used percentages. The results concluded that original local government revenue (PAD) in the Regency/city of South Sumatera province year 2017-2019 was volatile, which was the average of the highest original local government revenue in Palembang and the lowest in Muratara regency. The dominant general allocation fund (DAU) was increasing, which was the highest average of Palembang and the lowest in East OKI district. The Special Allocation Fund (DAK) was predominantly fluctuating, the highest average in Palembang and the lowest in Prabumulih city. Meanwhile, capital expenditure was fluctuating, where the highest capital expenditure was on Palembang city and lowest in Prabumulih city.

Keywords: PAD, DAU, DAK, capital expenditure.

PENGESAHAN

NO. 173 / Abstract / L.B.U.M.P. / VII / 20 20

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang 32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi merupakan norma hukum atau kaidah yang mengikat sebagai peraturan perundang-undangan bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang kemudian menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah.

Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Desentralisasi) untuk Mengurus Perekonomiannya Sendiri. Selain itu juga, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 butir (1) dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan harus mampu menggali dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Ahmad (2019: 81), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA). PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah. Dalam undang-undang tersebut diamanatkan bahwa suatu daerah diberikan kewenangan otonomi agar melaksanakan pembangunan di segala bidang dan diharapkan dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari segi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Kewenangan tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara konseptual yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia masih sangat tergantung dari dana transfer pusat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), khususnya pada level kabupaten/kota. Dana transfer itu dibagi menjadi tiga jenis: dana

perimbangan (Dana Bagi Hasil/DBH, Dana Alokasi Umum/DAU dan dana Alokasi Khusus/DAK).

Dana Alokasi Umum yang ditransfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dengan tujuan agar lebih fokus untuk menggunakan Pendapatan Asli Daerah yang dimilikinya dalam membiayai Belanja Modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya Belanja Modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan Dana Alokasi Umum. Dengan demikian, semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka alokasi Belanja Modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (Dana Alokasi Umum) yang besar maka alokasi untuk anggaran Belanja Modal akan meningkat.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk menambah asset tetap. Alokasi Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Sebelum mewujudkan pelayanan kepada publik, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun alokasi dan realisasi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diartikan sebagai daftar terperinci mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terdiri dari berbagai komponen yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang salah satunya berupa

Dana Alokasi Umum serta pengeluaran yang meliputi belanja-belanja. Salah satu komponen terpenting dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Belanja Modal, karena melalui belanja modal pelayanan kepada publik khususnya pemenuhan sarana dan prasarana atau infrastruktur dapat terwujud sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan belanja daerah. Belanja modal dibiayai dari dana PAD, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Namun dari dana tersebut tidak semuanya terealisasi dengan benar dan tepat. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya infrastruktur yang belum memenuhi standar atau bisa dikatakan belum memenuhi pelayanan kepada publik secara maksimal. Masalah yang riil terjadi yaitu jalan raya yang disana sini masih banyak yang berlubang, jika dibiarkan seperti itu maka pengguna jalan akan merasakan ketidaknyamanan. Masalah lain yaitu masih kurang memadainya infrastruktur yang terdapat di terminal serta masih banyak masalah lainnya yang perlu diperhatikan. Ini menunjukkan ada indikasi bahwa ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal. Sudah banyak penelitian sebelumnya memberikan hasil yang berbeda-beda.

Penelitian Yawa (2015) menyimpulkan bahwa variabel DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dan variable PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Secara bersama-sama DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kota Manado.

Penelitian Jumiawan (2018) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum

berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan penelitian Suryana (2018) menyimpulkan bahwa secara parsial bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sebesar 87,0%.

Penelitian Rifai (2019) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil secara parsial terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Uzair (2018) menyatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp3.329.245 jutaan mengalami penurunan sebesar Rp120.346 jutaan atau 3,49% dari tahun anggaran 2018. Sedangkan dana perimbangan tahun anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp6.235.428 jutaan mengalami peningkatan sebesar Rp558.743 jutaan atau 9,84% dari tahun anggaran 2018. Sedangkan untuk belanja daerah tahun anggaran 2019 dijelaskan bahwa Belanja Tidak Langsung tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp6.672.221 jutaan mengalami peningkatan sebesar Rp1.382.042 jutaan atau 26,12 persen dari tahun anggaran 2018. Belanja Langsung tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp3.041.251 jutaan mengalami penurunan sebesar Rp345.388 jutaan atau 10,20 persen dari tahun anggaran 2018. Sedangkan terkait untuk penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp52.549 jutaan yang

bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebelumnya, jika dibandingkan dengan Silpa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp40.981 jutaan meningkat sebesar Rp11.567 jutaan atau 28,23 persen.

Provinsi Sumatera Selatan secara administratif terdiri dari 12 Pemerintah Kabupaten dan 4 Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Pemerintahan Kabupaten/Kota tersebut antara lain: (1) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU); (2) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur); (3) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan); (4) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI); (5) Kabupaten Muara Enim; (6) Kabupaten Lahat; (7) Kabupaten Musi Rawas; (8) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba); (9) Kabupaten Banyuasin; (10) Kabupaten Empat Lawang; (11) Kota Ogan Ilir (OI); (12) Kota Palembang; (13) Kota Pagar Alam; (14) Kota Lubuk Linggau; (15) Kota Prabumulih; dan (16) Kabupaten Panukal Abab lematang Ilir (PALI).

Fenomena data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan antara tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak selalu terjadi kenaikan Belanja Modal di beberapa Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel I. 1
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan
Belanja Modal pada Kota Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan
(dalam jutaan rupiah)

No	Kota/Kabupaten	Tahun	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
1.	Lahat	2017	113.749	694.391	195.880	341.994
		2018	112.571	696.380	221.396	309.562
		2019	111.166	723.557	292.561	342.402
2.	Musi Banyuasin	2017	209.410	344.295	402.400	699.529
		2018	210.238	370.827	258.340	871.953
		2019	287.089	370.827	82.652	653.621
3.	Musi Rawas	2017	151.549	637.955	189.387	317.467
		2018	106.289	639.753	274.430	361.983
		2019	140.436	662.471	259.975	375.622
4.	Muara Enim	2017	226.929	661.337	254.378	530.347
		2018	232.469	661.337	235.689	556.629
		2019	227.483	686.251	286.101	695.305
5.	Ogan Komering Ilir	2017	222.962	1.042.871	306.001	473.964
		2018	235.946	1.053.841	369.717	302.186
		2019	190.197	1.083.057	361.847	487.490
6.	Ogan Komering Ulu	2017	172.013	631.234	213.447	338.867
		2018	156.622	636.234	183.162	328.754
		2019	124.996	661.417	83.419	312.649
7.	Palembang	2017	1.091.705	1.269.426	431.292	857.095
		2018	953.302	1.269.426	481.900	851.367
		2019	1.652.647	1.347.786	437.385	1.228.063
8.	Prabumulih	2017	119.193	412.229	85.088	162.394
		2018	90.911	416.313	97.781	119.551
		2019	96.498	416.313	47.142	177.249
9.	Pagar Alam	2017	65.539	387.412	178.178	195.242
		2018	73.600	391.943	113.819	92.576
		2019	65.338	415.897	105.229	113.911
10.	Lubuklinggau	2017	115.522	444.207	152.397	237.004
		2018	105.607	449.083	124.672	209.920
		2019	92.050	493.389	149.814	284.544
11.	Banyuasin	2017	125.984	923.772	292.160	303.105
		2018	140.602	933.632	319.249	266.429
		2019	137.051	957.361	382.989	634.192
12.	Ogan Ilir	2017	95.712	619.874	236.844	345.998
		2018	55.363	623.349	239.900	275.666
		2019	113.831	649.199	294.514	288.481

13.	OKU Timur	2017	77.707	755.658	230.775	291.446
		2018	85.235	767.167	268.449	278.117
		2019	90.525	809.985	296.791	453.119
14.	OKU Selatan	2017	89.507	585.270	168.540	292.933
		2018	42.993	598.063	176.994	311.606
		2019	47.423	622.585	181.148	318.123
15.	Empat Lawang	2017	68.807	415.914	149.969	202.981
		2018	32.217	424.011	187.918	248.436
		2019	52.348	442.984	132.995	198.201
16.	Penukal Abab Lematang Ilir	2017	56.935	317.402	73.803	393.155
		2018	74.393	317.402	152.942	622.813
		2019	93.630	325.991	106.161	705.435
17.	Musi Rawas Utara	2017	57.581	378.211	83.959	279.488
		2018	30.142	383.935	187.337	323.942
		2019	54.631	397.354	122.509	345.677

(Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2020)

Tabel I.1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dari 17 Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan pada Kabupaten Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Palembang, Prabumulih, Pagar Alam, Banyuasin, Ogan Ilir, OKU Selatan, Empat Lawang, dan Musi Rawas Utara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 ke 2018 Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten tersebut mengalami penurunan atau sebaliknya, namun pada tahun 2018 ke 2019 terjadi peningkatan atau sebaliknya. Turunnya Pendapatan Asli Daerah bisa disebabkan dari penerimaan pendapatan yang rendah, misalnya penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Permasalahan ini tidak hanya terjadi pada kenaikan dan penurunan PAD saja, namun juga dapat dilihat dari DAU pada setiap masing-masing Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017-2019 meningkat. Berdasarkan Tabel I.1, diketahui bahwa belanja modal dari tahun 2017-2019 rata-

rata mengalami fluktuasi, akan tetapi pada Kabupaten Lahat, Banyuasin, Ogan Ilir, OKU Timur dan OKU Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019. Demikian juga untuk belanja modal Kota/Kabupaten mengalami fluktuatif. Hanya pada Kabupaten Musi Rawas, Muara Enim, OKU Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Musi Rawas Utara yang mengalami peningkatan pada tahun 2017-2019. Hal ini dikarenakan banyaknya pendapatan daerah yang diterima sehingga membuat belanja modal tinggi, sedangkan Kabupaten Ogan Komering Ulur mengalami penurunan.

Permasalahan lainnya yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal adalah secara individu setiap daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda. Artinya kabupaten/kota yang memiliki sumber daya yang melimpah tentu akan mampu memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sementara kabupaten yang memiliki sumber daya yang terbatas maka akan memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang rendah pula. Faktor lainnya adalah kondisi geografis suatu daerah yang dapat menimbulkan besarnya anggaran yang dikeluarkan dalam membiayai pembangunan. Selain itu juga, adanya pengalihan anggaran untuk membiayai Pilkada menyebabkan penundaan beberapa proyek pembangunan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dan perbedaan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal dengan judul: **“Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi**

Khusus dan Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal pada kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal pada kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti dalam bidang akuntansi khususnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus serta Belanja Modal di Pemerintahan Provinsi, Kota dan Kabupaten.

2. Bagi Intansi Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah.

3. Bagi Almamater

Menambah perbendaharaan kepustakaan. Tugas akhir skripsi ini akan memperkaya jumlah literatur yang dapat digunakan oleh kalangan akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. 2019. *Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah: Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Azkiya Publishing
- Awaniz, Berlian Nur. 2014. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Eks Karasidenan Pekalongan*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Badruddin, Rudy. 2016. *Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan Volume 9 No 1 April 2011.
- Halim, Abdul. 2016. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hibzon. 2007. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 5, No. 2, Hal:106-116. Inderalaya: Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
- Indraningrum, Try. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Juniawan, Made Ari. 2018. *Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali*. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 3, 2018: 1255-1281. Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Kirana, Wihana. 2002. *Ekonomi Industri*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Kosim, Engkos. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Banjar*. Journal of management Review ISSN-P : 2580-4138 ISSN-E 2579-812X Volume 1 Number 1 Page (13-23). Ciamis: Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Galuh Ciamis.
- Laporan Penelitian Dana Transfer Pusat ke Daerah. 2010. *Penyempurnaan Grand Design Desentralisasi Fiskal*.
- Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

- Monteiro, Josef M. 2017. *Pokok-pokok Hukum Keuangan Negara & Daerah*. Malang: Inteligencia Media.
- Ndede, Yunistin. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 03 Tahun 2016. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado
- Priambudi, Wimpi. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013*. Jurnal Nominal / Volume Vi Nomor 1 / Tahun 2017. Yogyakarta: Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Purnomo, Budi. 2009. *Obligasi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Rifai, Rachmawati A. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah*. e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 7, Juli 2017. Pontianak: Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Samau, Naydy. 2016. *Analisis Kontribusi Serta Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 02 Tahun 2016. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Sholikhah, Imroatus. 2014. *Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa*. Accounting Analysis Journal 3 (4) (2014). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Siregar, Baldric. 2016. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. *Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi & Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suryana. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal*. Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis – Vol 9 No 2 September 2018. Bandung: Universitas Widyatama.
- Yaqin, Uun Ainul. 2018. *Analisis Permasalahan Pengelolaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Pemerintah Daerah*. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol. 1(2), 2018, halaman 123-136. Lombok: Magister Akuntansi Universitas Mataram.

Yawa, Herman. 2015. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal di Kota Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 04 Tahun 2015. Manado: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.